



Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi

Wilda Amelia Putri^{1*}, Aisyaturrahmi²

^{1, 2} Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia.

E-mail: wilda.21076@mhs.unesa.ac.id^{1*}, aisyaturrahmi@unesa.ac.id²

*Korespondensi Penulis: wilda.21076@mhs.unesa.ac.id¹

Abstract. *The purpose of this study is to investigate the impact of political relationships on tax avoidance, with audit quality as a moderating variable. The background of this study is based on the occurrence of continuous tax avoidance methods, especially among corporations that have relationships with political entities. This study employs a quantitative approach using a causal-comparative methodology. The research sample includes manufacturing and trading companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2023. Analysis utilizes multiple linear regression and MRA with a Generalized Least Squares (GLS). The findings show that political connections have a positive and significant impact on tax avoidance. However, audit quality cannot moderate this relationship. These findings suggest that companies with political connections are more likely to avoid taxes, and that external auditors have not been entirely successful in their oversight role.*

Keywords: *Audit Quality, External Auditors, Moderating Variable, Political Connections, Tax Avoidance.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak hubungan politik terhadap penghindaran pajak, dengan kualitas audit sebagai variabel moderator. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada terjadinya metode penghindaran pajak secara terus-menerus, terutama di kalangan korporasi yang memiliki hubungan dengan entitas politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metodologi kausal-komparatif. Sampel penelitian meliputi perusahaan manufaktur dan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023. Analisis menggunakan regresi linier berganda dan MRA dengan pendekatan *Generalized Least Squares* (GLS). Temuan menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, kualitas audit tidak dapat memoderasi hubungan ini. Temuan ini menyarankan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik lebih cenderung menghindari pajak, dan bahwa auditor eksternal belum sepenuhnya berhasil dalam peran pengawasan mereka.

Kata Kunci: Auditor Eksternal, Kualitas Audit, Koneksi Politik, Moderasi, *Tax Avoidance*.

1. LATAR BELAKANG

Kewajiban fiskal ialah kontributor utama kas negara dengan menyumbang sebagian besar dari total pendapatan pada pertumbuhan nasional (Putri & Kartika, 2025). Pajak menjadi elemen krusial pembiayaan negara yang menopang pembangunan keberlanjutan (Venusita et al., 2025). Dalam pelaksanaannya, sistem perpajakan diatur melalui regulasi khusus, namun kelemahan dalam peraturan membuka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak. Istilah ini mencakup tindakan sengaja yang diambil untuk mengurangi kewajiban pajak melalui cara-cara yang sah (Girindratama et al., 2024). Meskipun tidak dilarang, teknik ini tidak sesuai pada semangat atau orientasi utama dari regulasi perpajakan, dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara (Payamta et al., 2024). Di Indonesia, penghindaran pajak diperkirakan menyebabkan kehilangan penerimaan sampai Rp 68,7 setiap tahunnya (*Tax Justice International*, 2020).

Sektor manufaktur dan perdagangan merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak. Berdasarkan data APBN Kita (2023), sektor manufaktur menyumbang 29,6% terhadap PDB pada 2021, namun mengalami penurunan menjadi 26,9% pada 2023. Sebaliknya, sektor perdagangan mengalami peningkatan. Penurunan ini turut tercermin dalam *tax ratio* Indonesia yang sempat mencapai 10,39% pada 2022, namun turun menjadi 10,21% pada 2023 (Eka, 2024). Kondisi ini menunjukkan lemahnya kepatuhan pajak serta pengelolaan yang belum optimal (Saputra, 2023).

Studi terdahulu menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* marak terjadi di sektor manufaktur, seperti kasus PT Bentoel International (RMBA) yang menyebabkan kerugian hingga US\$ 14 juta per tahun melalui transaksi afiliasi (Wildan, 2020). Grup Bakrie juga tercatat memiliki tunggakan pajak dalam jumlah besar. Berbagai faktor mempengaruhi praktik *tax avoidance*, dengan hubungan politik sebagai salah satu diantaranya. Koneksi politik, yaitu hubungan antara entitas bisnis dengan pejabat atau partai politik (Putra & Suhardianto, 2020). Perusahaan yang memiliki akses dekat dengan pejabat pemerintah kerap memanfaatkan jaringan ini untuk menekan kewajiban pajak mereka melalui metode penghindaran pajak yang agresif.

Namun, hasil penelitian terkait pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa studi menunjukkan pengaruh signifikan (Ajili & Khlif, 2020; Indarti & Widiatmoko, 2023). sedangkan lainnya menunjukkan tidak adanya hubungan, terutama jika perusahaan memiliki etika bisnis yang tinggi (Rudyanto et al., 2023; Ishak & Asalam, 2023).

Salah satu celah dalam penelitian sebelumnya adalah kurangnya perhatian terhadap variabel kualitas audit sebagai faktor moderasi. Audit yang berkualitas tinggi, terutama KAP bereputasi seperti *Big Four*, diyakini bisa menekan praktik *tax avoidance* dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Angel et al., 2022; Payamta et al., 2024). Namun, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak selalu efektif dalam mengurangi *tax avoidance* (Junaidi et al., 2023; Kusuma & Rahayu, 2022).

Penelitian ini menggunakan teori agensi untuk menjelaskan potensi konflik manajer dan pemilik, di mana kualitas audit berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal untuk menekan perilaku oportunistik manajemen. Sehubungan konteks tersebut, riset ini dirancang guna menyelidiki sejauh mana keterlibatan hubungan politik memengaruhi praktik penghindaran pajak, serta mengevaluasi peran kualitas audit sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) merancang *agency theory* sebagai dasar konseptual hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*, di mana otoritas pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan dialihkan dari pemilik kepada manajer yang bertindak sebagai agen. Namun, karena perbedaan kepentingan serta ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi), seringkali timbul konflik antara kedua belah pihak (Alsmady, 2023). Untuk mencapai hasil yang optimal, suatu perusahaan harus melakukan pemisahan fungsi antara pengelola dan pemilik (Khotijah et al., 2025). Potensi munculnya masalah agen tetap ada karena pemisahan antara manajemen dengan pemegang saham (Permatasari, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan teori agensi tipe I (*classical principal-agent theory*), yang berfokus pada konflik antara pemilik dan manajer. Dalam konteks ini, keputusan manajerial tidak jarang dipengaruhi oleh kepentingan individu yang mendorong praktik seperti penghindaran pajak sebagai upaya memaksimalkan keuntungan pribadi, meskipun berpotensi bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan, karena punya akses informasi lebih besar dibandingkan pemilik (Maharani & Baroroh, 2021). Dalam menentukan wewenang saat pengambilan keputusan bagi perusahaan, hal tersebut dapat menyebabkan konflik keagenan yang membentuk tidak simetrisnya informasi (Thohiroh & Aisyaturrahmi, 2022).

Koneksi politik menjadi salah satu elemen yang dapat memperburuk permasalahan agensi. Perusahaan dengan afiliasi politik, seperti hubungan erat dengan pejabat pemerintah juga afiliasi dengan partai politik, cenderung memiliki akses terhadap informasi strategis, serta kemungkinan perlindungan dari pengawasan atau sanksi hukum. Adanya jaringan kekuasaan yang melibatkan aktor politik menciptakan persepsi perlindungan institusional bagi manajer, yang pada akhirnya meningkatkan keberanian mereka dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Namun, konflik kepentingan ini dapat diminimalkan melalui mekanisme pengawasan eksternal, salah satunya adalah kualitas audit. Kehadiran auditor independen yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Auditor dari firma akuntansi ternama, terkhusus *Big Four*, cenderung punya standar profesional tinggi dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan manajerial. Dengan pengawasan yang ketat, manajer menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, termasuk dalam upaya menghindari pajak.

Dengan demikian, teori agensi memberikan kerangka konseptual yang tepat untuk memahami bagaimana koneksi politik dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak, serta bagaimana kualitas audit berperan dalam mengurangi perilaku oportunistik tersebut. Penelitian ini menguji hubungan tersebut dalam konteks perusahaan manufaktur, yang punya tingkat peran substansial terhadap dinamika nasional namun juga rawan terhadap upaya legal meminimalkan beban pajak.

2.2 Tax Avoidance

Tindakan minimisasi pajak mengacu pada pedekatan yang ditempuh oleh subjek pajak dalam rangka meminimalkan keharusan perpajakan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan yang masih dianggap sah secara hukum, tetapi tidak sejalan pada semangat regulasi perpajakan. Menurut (Kusuma & Rahayu, 2022), strategi minimisasi pajak diartikan sebagai langkah legal yang ditempuh oleh subjek pajak dalam mereduksi kewajiban fiskal mereka dengan memanfaatkan kekosongan atau ambiguitas dalam struktur peraturan perpajakan yang berlaku. Senada dengan itu, (Sulia, 2024), menyatakan bahwa *tax avoidance* ialah cara legal untuk meminimalisir beban pajak, namun seringkali dinilai tidak etis karena berpotensi mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara. Kendati tidak berada dalam wilayah pelanggaran hukum yang eksplisit, tindakan *tax avoidance* sering dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan yang tersembunyi karena tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, penting bagi regulator dan akademisi untuk mengukur sejauh mana perusahaan melakukan *tax avoidance* agar dapat mengkaji kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap fiskal negara.

Kajian ini difokuskan pada pengukurannya memakai *Effective Tax Rate* (ETR), sebagaimana digunakan dalam studi sebelumnya oleh (Lukito & Oktaviani, 2022), (Indarti & Widiatmoko, 2023), serta (Ubaidillah, 2022). ETR dipilih karena indikator ini mencerminkan secara langsung tingkat efektivitas pembayaran pajak oleh perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak.

2.3 Koneksi Politik (*Political Connection*)

Menurut Faccio (2006) dalam studi yang dikutip oleh (Hidayati & Diyanty, 2021) koneksi politik merujuk pada kondisi di mana pihak internal perusahaan, seperti anggota dewan direksi dan manajemen kunci mempunyai hubungan formal ataupun informal melalui individu dalam lingkup kenegaraan. Dalam konteks teori kekuasaan politik, entitas bisnis yang menjalin hubungan dengan aktor politik umumnya mengoptimalkan kedekatan tersebut guna memperoleh keuntungan, seperti kemudahan dalam mengakses sumber daya ekonomi,

penghindaran dari regulasi yang ketat, serta perlindungan dari risiko hukum dan audit (Hidayati & Diyanty, 2021). Entitas bisnis yang menjalin kedekatan dengan aktor politik dapat menikmati berbagai fasilitas, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman, pengawasan regulatif yang lebih longgar, dan risiko audit beban pajak yang lebih ringan. Situasi ini membuka peluang untuk entitas bisnis dalam upaya praktik pengelakan pajak yang sesuai hukum, karena merasa lebih aman dari inventaris atau sanksi pemerintah (Ubaidillah, 2022).

Semakin intensif perusahaan memanfaatkan jejaring politik, kesempatan melakukan penghindaran pajak akan semakin meningkat. Afiliasi pemerintahan dapat memengaruhi keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam hal pengelolaan kewajiban pajak, serta meningkatkan kemampuan bertahan dan bersaing di pasar. Kriteria perusahaan yang dianggap memiliki koneksi politik mengacu pada penelitian (Firmansyah et al., 2022) serta (Putra & Suhardianto, 2020), yang menguraikan jika koneksi politik diidentifikasi jika salah satu dari anggota dewan direksi atau dewan komisaris perusahaan merupakan anggota atau mantan anggota parlemen, menteri atau mantan menteri/anggota kabinet, anggota atau mantan anggota partai politik, pejabat atau mantan pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Untuk memperoleh data koneksi politik, penelitian ini akan menganalisis profil direksi dan komisaris perusahaan melalui annual report masing-masing entitas.

2.4 Kualitas Audit (*Audit Quality*)

Audit yang berkualitas dapat diartikan menjadi kemampuan auditor dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi laporan keuangan secara independen, objektif, dan profesional. Auditor yang berkualitas tinggi mampu mendeteksi kesalahan atau ketidakwajaran dalam pelaporan keuangan, guna menjamin dokumen pelaporan tersebut telah selaras pada kaidah akuntansi dan regulasi yang diakui (Indarti & Widiatmoko, 2023). Kualitas audit memainkan peran penting sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat membatasi tindakan manajerial oportunistik, termasuk dalam bentuk *tax avoidance* (Angel et al., 2022). Audit yang dilakukan dengan standar tinggi dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator bahwa laporan keuangan merepresentasikan keadaan finansial entitas secara wajar serta terbebas dari rekayasa demi keuntungan pihak tertentu. Dengan demikian, audit berkualitas tidak hanya memberikan jaminan atas integritas laporan keuangan tetapi juga mendorong perusahaan (KAP) yang mengaudit perusahaan. Salah satu indikatornya adalah keanggotaan auditor pada *Big Four* dengan metodologi audit yang lebih ketat, serta reputasi global yang kuat dalam menjaga independensi dan profesionalisme (Indarti & Widiatmoko, 2023; Junaidi et al., 2023). Kualitas audit dalam studi ini direpresentasikan melalui variabel biner, dimana angka 1 dialokasikan pada laporan keuangan yang diperiksa auditor KAP *Big Four*, sementara nilai 0 diberikan pada laporan yang diperiksa selain KAP tersebut.

2.5 Hipotesis

H₁: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₂: Kualitas audit memperlemah hubungan antara koneksi politik dan *tax avoidance*.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif yang diterapkan dalam riset ini didasarkan pada kerangka paradigma positivisme sebagai landasan epistemology. Kajian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan fondasi pada paradigma positivisme, dengan tujuan menguji hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti. Studi ini dirancang untuk mengeksplorasi pengaruh koneksi politik dengan penghindaran pajak, juga kualitas audit dengan peran moderasi. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan instrumen statistik guna menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2020). Data sekunder menjadi dasar studi ini, yaitu data yang dihimpun secara tidak langsung pada sumber yang terdokumentasi sebelumnya. Melalui *annual report* dan laporan keuangan melalui situs resmi BEI serta situs web entitas bisnis yang menjadi objek studi.

Teknik yang dipakai saat prosedur sampling ialah *purposive sampling*, sebagai metode *non-probabilitas* dengan menetapkan karakteristik dalam menentukan sampel yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Seluruh entitas bisnis sektor manufaktur dan perdagangan yang telah terdaftar di BEI pada waktu 2021 hingga 2023. Berdasarkan proses seleksi, diperoleh total 81 perusahaan (jumlah disesuaikan setelah data diperoleh) yang memenuhi kriteria antara lain: (1) Terdaftar di BEI secara konsisten pada 2021-2023. (2) Tidak mengalami kerugian dalam tahun 2021-2023. (3) Menyampaikan data secara lengkap periode tahun 2021-2023 yang berhubungan dengan variabel dan kriteria studi.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Studi berikut melibatkan tiga variabel: independen, dependen, serta moderasi. Berikut definisi operasionalnya:

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Pengukuran	Sumber
Variabel Dependen			
<i>Tax Avoidance</i> (TA)	Diukur menggunakan proksi <i>Effective Tax Rate</i> (ETR), yang diperoleh dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.	$ETR = \frac{\text{Beban pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Indarti & Widiatmo ko (2023)

Variabel Independen			
Koneksi Politik (KP)	Diukur berdasarkan keberadaan individu dalam dewan direksi atau dewan komisaris yang memiliki afiliasi politik atau hubungan dengan partai politik, atau terafiliasi dengan pemerintah.	Indikator variabel dummy: Dummy 1 = Entitas memiliki koneksi politik. Dummy 0 = Entitas tidak memiliki koneksi politik.	Putra & Suhardianto (2020)
Variabel Moderasi			
Kualitas Audit (KA)	Diukur berdasarkan ukuran KAP. Perusahaan yang diaudit oleh KAP “ <i>Big Four</i> ” dan “ <i>Non-Big Four</i> ”.	Indikator variabel dummy: Dummy 1 = Diaudit oleh KAP Big Four, Dummy 0 = Diaudit oleh KAP non-Big Four.	Payamta et al. (2024)
Variabel Kontrol			
Ukuran Perusahaan (SIZE)	Diukur berdasarkan skala besar dan kecilnya perusahaan.	Ukuran perusahaan = Ln Total Aset	Mayndarto, (2022)

3.2 Teknik Analisis Data

Pengolahan data studi ini memanfaatkan *software* Stata versi 17. Riset ini mengadopsi pendekatan statistik deskriptif, matriks korelasi, pemilihan model regresi terbaik, pengujian kelayakan model melalui uji asumsi klasik, dan uji hipotesis guna memperoleh kesimpulan empiris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Numerik

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
TA	243	.2322086	.0457383	.1125367	.4141599
SIZE	243	29.02058	1.624829	25	34

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Mean dari *tax avoidance* senilai 0,2322 mengindikasikan bahwa entitas pada sampel menghindari sekitar 23,22% dari kewajiban pajaknya. Batas bawah mencapai 0,1125 dan maksimum sebesar 0,4142 menandakan adanya variasi dalam praktik *tax avoidance* antar perusahaan. Untuk variabel ukuran perusahaan (SIZE), *mean* log total aset senilai 29,0206 serta standar deviasi 1,6248 menunjukkan adanya variasi yang moderat dalam ukuran perusahaan pada sampel.

Sebanyak 126 perusahaan (51,85%) dari total sampel memiliki koneksi politik, sedangkan 117 perusahaan (48,15%) tidak memiliki koneksi politik. Temuan ini menyiratkan sebagian besar entitas yang diteliti punya afiliasi politik, baik melalui kepemilikan maupun keberadaan dewan direksi atau komisaris yang memiliki riwayat jabatan di instansi pemerintahan, baik masa lalu maupun saat ini. Sementara itu, sebanyak 43,21% perusahaan diawasi secara independen oleh firma akuntansi *Big Four* yang dinilai dengan standar bermutu, sedangkan 56,79% lainnya memakai firma akuntansi yang lain. Sehingga mengindikasikan bahwasanya sebagian besar entitas dalam sampel belum menggunakan auditor dari kelompok *Big Four*.

Tabel 2. Tabel Frekuensi

KP	Freq.	Percent	Cum.
0	117	48.15	48.15
1	126	51.85	100.00
Total	243	100.00	

KA	Freq.	Percent	Cum.
0	138	56.79	56.79
1	105	43.21	100.00
Total	243	100.00	

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

4.2 Pemilihan Model Regresi

Terdapat tiga prosedur yang akan dievaluasi yaitu *pooled least squares*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Ketiga metode tersebut akan diuji melalui uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier*.

4.3 Uji Lagrange Multiplier

Merujuk temuan pengujian *lagrange multiplier* pada tabel 3, menghasilkan $\chi^2 = 22,91$ dengan $p\text{-value} = 0,0000 (< 0,05)$. Artinya, H_0 ditolak. Terdapat efek individual yang signifikan, sehingga metode yang dipilih adalah *Random Effect*.

Tabel 3. Uji Lagrange Multiplier

Test: Var(u) = 0	
$\chi^2(01)$	= 22.91
Prob > χ^2	= 0.0000

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

4.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pada uji normalitas menunjukkan p-value sebesar 0,00012 ($< 0,05$), sehingga data tidak berdistribusi normal. Karena itu, digunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS) yang mampu menangani pelanggaran asumsi klasik dan menghasilkan estimasi yang lebih valid dan efisien.

Tabel 4. Uji Normalitas

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
e9	243	0.97257	4.852	3.669	0.00012

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
KA6	1.55	0.646529
SIZE6	1.43	0.698007
KP6	1.28	0.782491
Mean VIF	1.42	

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Hasil uji VIF menunjukkan nilai KA6 sebesar 1,55, SIZE6 sebesar 1,43, dan KP6 sebesar 1,28, dengan rata-rata VIF 1,42. Seluruh nilai berada di bawah 10 dan *tolerance* di atas 0,1, sehingga tidak ditemukan indikasi multikolinearitas. Dengan demikian, model regresi dinilai stabil dan hasil estimasi dapat diinterpretasikan secara valid.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian menghasilkan probabilitas senilai 0,0782 ($> 0,05$), sehingga tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. Artinya, model memenuhi asumsi homoskedastisitas, dan varians residual dianggap stabil.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

H0: Constant variance
chi2(1) = 3.10
Prob > chi2 = 0.0782

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

4. Uji Autokorelasi

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Wooldridge test for autocorrelation in panel data			
H0: no first order autocorrelation			
F(1,	80) =	0.704	
Prob > F =	0.4039		

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Uji melihatkan besaran F yaitu 0,704 serta p-value 0,4039 ($> 0,05$), sehingga tidak terdapat autokorelasi orde pertama. Artinya, asumsi independensi residual terpenuhi, dan hasil estimasi regresi dapat dianggap valid dan dapat dipercaya.

4.5 Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi *Generalized Least Squares* (GLS)

Tabel 8. Analisis Regresi *Generalized Least Squares* (GLS)

Estimated covariances	=	1	Number of obs	=	243
Estimated autocorrelations	=	0	Number of groups	=	81
Estimated coefficients	=	4	Time periods	=	3
			Wald chi2(3)	=	17.10
Log likelihood	=	490.2056	Prob > chi2	=	0.0007

TA6	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
KP6	.0176962	.0046714	3.79	0.000	.0085405	.0268519
KA6	-.0014847	.0051836	-0.29	0.775	-.0116443	.008675
SIZE6	-.0043492	.0019191	-2.27	0.023	-.0081106	-.0005879
_cons	.3487243	.0543203	6.42	0.000	.2422585	.4551902

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Probabilitas model regresi signifikan secara keseluruhan uji Wald senilai 0,0007 ($< 0,05$), menunjukkan bahwa variabel independen dan moderasi bersama-sama memengaruhi pengelakan beban pajak. Sehingga, dijelaskan bahwa:

- Afiliasi politik berkorelasi dengan tingkat *tax avoidance* (koefisien 0,0177; p-value 0,000), yang berarti entitas yang berafiliasi politik cenderung untuk aktif dalam penghindaran pajak.

b) Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan (koefisien -0,0015; p-value 0,775).

Dengan asumsi homoskedastisitas dan tanpa autokorelasi terpenuhi, hasil regresi dapat dianggap andal. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa koneksi politik meningkatkan praktik penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit tidak berperan signifikan dalam konteks ini.

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Digunakan agar mengetahui efek spesifik afiliasi politik tiap variabel bebas secara individual pada variabel terikat (*tax avoidance*). Estimasi dilakukan menggunakan metode regresi Generalized Least Squares (GLS).

a) Koneksi Politik

Nilai z senilai 3,79 dengan *p-value* 0,000. Dengan itu, koneksi politik memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Artinya, kian kuat koneksi politik yang terasosiasi suatu entitas, kian meningkat kecenderungannya guna memanfaatkan celah perpajakan secara legal. Aspek tersebut dapat timbul akibat kemungkinan adanya perlindungan atau toleransi dari otoritas pajak terhadap perusahaan yang memiliki afiliasi politik.

b) Kualitas Audit

Besaran z yaitu -0,29 dengan *p-value* 0,775, yang mengindikasikan ketiadaan efek yang signifikan pada *tax avoidance*. Karenanya, kualitas audit, dalam ranah ini tidak menjadi faktor penentu dalam praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.

c) Ukuran Perusahaan

Besaran z yaitu -2,27 dan *p-value* 0,023, yang mengindikasikan implikasi negatif secara signifikan pada penghindaran pajak. Temuan tersebut menegaskan bahwa entitas berskala besar umumnya lebih mematuhi saat memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan perusahaan kecil. Faktor reputasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan besar bisa menjadi alasan di balik temuan ini.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Random-effects GLS regression	Number of obs	=	243
Group variable: ID	Number of groups	=	81
R-squared:	Obs per group:		
Within = 0.0001	min =		3
Between = 0.1086	avg =		3.0
Overall = 0.0657	max =		3

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Nilai *within* R^2 sebesar 0,0001 mengindikasikan bahwa variabel bebas tidak secara memadai menjelaskan fluktuasi *tax avoidance* dalam perusahaan dari waktu ke waktu. Artinya, perubahan *tax avoidance* secara temporal lebih terindikasi oleh determinan lain. Nilai *between* R^2 sebesar 0,1086 menunjukkan bahwa sekitar 10,86% variasi antar perusahaan dapat dijelaskan oleh koneksi politik, kualitas audit, dan ukuran perusahaan. Ini menandakan model lebih efektif membedakan *tax avoidance* antar perusahaan dibandingkan dalam satu perusahaan. Sementara itu, *overall* R^2 sebesar 0,0657 mengindikasikan bahwa secara keseluruhan model hanya menjelaskan 6,57% variasi *tax avoidance*. Meski rendah, hasil uji *Wald chi*² yang signifikan menunjukkan bahwa model tetap memiliki kontribusi statistik yang bermakna.

4. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 10. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Linear regression		Number of obs	=	243
		F(4, 238)	=	3.90
		Prob > F	=	0.0044
		R-squared	=	0.0656
		Root MSE	=	.04456

TA	Coefficient	Robust std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
KP	.0306388	.0087957	3.48	0.001	.0133115	.0479661
KA	-.0026448	.010254	-0.26	0.797	-.0228451	.0175555
interaksi	-.0138037	.014007	-0.99	0.325	-.0413973	.0137899
SIZE	.0006222	.0007901	0.79	0.432	-.0009343	.0021787
_cons	.2016589	.0228087	8.84	0.000	.1567262	.2465915

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Temuan dari proses analisis MRA menunjukkan rincian berikut:

a) Koneksi Politik

Adanya pengaruh positif signifikan koneksi politik dengan *tax avoidance* (koefisien = 0.0306, $p = 0.001$). Artinya, semakin kuat koneksi politik perusahaan, semakin besar kecenderungannya melakukan penghindaran pajak.

b) Kualitas Audit

Tidak ditemukan pengaruh audit yang berkualitas terhadap perilaku penghindaran pajak ($p = 0.797$), sehingga penggunaan auditor dari KAP Big Four belum tentu mampu menekan praktik penghindaran pajak.

c) Moderasi Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Interaksi $KP \times KA$ sebagai variabel moderasi menunjukkan koefisien negatif (-0.0138) namun tidak signifikan ($p = 0.325$), sehingga kualitas audit tidak memoderasi pengaruh koneksi politik atas aktivitas *tax avoidance*.

4.6 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*

Analisis empiris mengindikasikan jika koneksi politik mempunyai implikasi positif pada penghindaran pajak, dengan estimasi koefisien sebesar 0,0177 dan nilai $p = 0,000$. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Indarti & Widiatmoko (2023), Alsmady (2023), (Ishak & Asalam, 2023), Firmansyah et al. (2022), serta Dessy Juliana & Hari Stiawan (2022). Entitas bisnis yang terafiliasi secara politis cenderung mengambil keuntungan dari akses terhadap regulasi dan perlindungan tertentu untuk menginisiasi penghindaran pajak secara agresif. Hal ini berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan mencerminkan lemahnya tata kelola serta transparansi pajak.

Dari perspektif teori agensi, praktik ini mencerminkan adanya asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Manajemen dapat bertindak oportunistik mengambil risiko untuk kepentingan pribadi karena lemahnya pengawasan, terutama saat memiliki dukungan politik yang memperkuat posisi mereka. Merujuk pada temuan tersebut, untuk itu hipotesis H_1 diterima: **“Koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*.”**

4.7 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*

Temuan ini mengindikasikan jika mutu audit tidak memiliki dampak yang signifikan pada penghindaran pajak ($p = 0,797$), dan tidak ditemukan efek moderasi dalam interaksi antara koneksi politik dan tindakan penghindaran pajak, tercermin melalui koefisien interaksi mencapai -0,0138 dan $p = 0,325$. Analisis ini menyiratkan bahwa keberadaan auditor berkualitas tinggi dalam hal reputasi maupun kompetensi profesional belum mampu membatasi strategi penghindaran kewajiban perpajakan, khususnya di dalam entitas bisnis yang terafiliasi dengan kekuatan politik. Hal tersebut sesuai dengan studi Nurhidayah et al. (2021), Yahya et al. (2021), Rusdiani & Umaimah (2023), Helmi & Kurniadi (2024), serta Diandra & Ariani (2023). Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah perlindungan dari kekuatan politik yang dapat melemahkan efektivitas audit, terutama jika penghindaran pajak dilakukan secara legal dan terselubung. Dalam konteks ini, pengaruh politik berpotensi mengurangi independensi auditor serta mempersempit ruang pengawasan mereka.

Secara teoritis, menurut teori agensi, audit berkualitas seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksternal untuk menekan asimetri informasi dan mencegah tindakan oportunistik manajemen. Namun, temuan dalam studi ini mengindikasikan bahwa peran tersebut belum diimplementasikan secara optimal, terutama pada perusahaan yang berada dalam jaringan kekuasaan politik. Dengan demikian, hipotesis H₂ ditolak: “Kualitas audit tidak mampu memperlemah maupun memperkuat hubungan antara koneksi politik dan *tax avoidance*.”

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk temuan empiris menunjukkan jika hubungan politik menunjukkan dampak yang konstruktif secara signifikan pada praktik penghindaran pajak, sehingga entitas dengan afiliasi politik rentan lebih agresif dalam mengurangi beban pajaknya. Sebaliknya, kualitas audit tidak memoderasi hubungan antara koneksi politik dan *tax avoidance*, yang berarti keberadaan auditor dari KAP *Big Four* tidak memiliki pengaruh dalam memperkuat maupun melemahkan dampak koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

Mengacu pada temuan ini, bagi studi selanjutnya terkait pengukuran *tax avoidance* dapat dikembangkan dengan pendekatan lain, seperti abnormal ETR atau *Book-Tax Differences* (BTD), untuk memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai praktik penghindaran pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Ajili, H., & Khelif, H. (2020). Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 155–171. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0015>
- Alsmady, A. A. (2023). the Effect of Political Connection on Corporate Tax Avoidance: the Moderating Role of Accounting Information Quality. *Journal of Governance and Regulation*, 12(1 Special Issue), 333–347. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i1siart12>
- Angel, M., Darnawaty, F., & Liona, L. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk Periode 2017-2020. *Owner*, 6(3), 1556–1564. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.960>
- Dessy Juliana, & Hari Stiawan. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 283–291. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i3.804>
- Diandra, P. K., & Ariani, Y. (2023). Pengaruh Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Balance Vocation Accounting Journal*, 7(2), 92. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v7i2.9681>
- Eka, B. (2024). Penurunan target rasio perpajakan dalam rapbn 2025. *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*.
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S.,

- Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Maburur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Girindratama, M. W., Nuswantara, D. A., & Alnajar, A. E. A. (2024). The Dark Tetrad Personality Traits of Tax Avoidance in the Manufacturing Small and Medium Enterprises; an Empirical Evidence from Indonesia. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 16(1), 55–74. <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n1.p55-p74>
- Helmi, S. M., & Kurniadi, A. (2024). Pengaruh Leverage, Kualitas Audit, dan Intensitas Modal Terhadap Tax avoidance. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 1–6. <https://doi.org/10.31294/moneter.v11i1.17200>
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(1), 46–60. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art5>
- Indarti, M. G. K., & Widiatmoko, J. (2023). Political Connections and Tax Avoidance: Does Audit Quality Moderate The Relationship? *Jurnal Aset (Riset Akuntansi)*, 15(2), 295–306. <https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/62523/25806>
- Ishak, A. C., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(4), 2041–3051. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1720>
- Junaidi, R. R., Andriyani, N. R., & Hajawiyah, A. (2023). the Bidirectional Interaction Between Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: the Moderating Role of Audit Quality. *Journal of Governance and Regulation*, 12(4 Special Issue), 297–305. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i4siart9>
- Kementerian Keuangan RI. (2023). APBN Kita edisi 2023. *Media.Kemenkue.Go.Id*, 1–146. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/1a28b5ae-91df-44f0-8e40-5e21056a974e/V-1-Final-Publikasi-APBN-KiTa-Edisi-Januari-2023.pdf?ext=.pdf>
- Khotijah, F. S., Fitri, N., Inayah, N. P., Kusumaningtias, R., & Kusumaningsih, A. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perusahaan Healthcare. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(2), 310–316. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i2.2126>
- Kusuma, M., & Rahayu, P. (2022). Can Other Comprehensive Income be Used for Tax Avoidance? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 68–79. <https://doi.org/10.9744/jak.24.2.68-79>
- Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(1), 202–211. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.532>
- Maharani, F. S., & Baroroh, N. (2019). The Effects of Leverage, Executive Characters, and Institutional Ownership to Tax Avoidance with Political Connection as Moderation. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 81–87. <https://doi.org/10.15294/AAJ.V8I2.30039>
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Nurhidayah, L. P., Wibawaningsih, E. J., & Fahria, R. (2021). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding*

- Biema: Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2(1), 627–642.
- Payamta, P., Sulistio, E. J. S., & Ardianingsih, A. (2024). the Analysis of the Characteristics of External Auditor and Audit Committees: Tax Avoidance. *Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions*, 14(2), 8–14. <https://doi.org/10.22495/rgcv14i2p1>
- Permatasari, I. (2020). Does corporate governance affect bank risk management? Case study of Indonesian banks. *International Trade, Politics and Development*, 4(2), 127–139. <https://doi.org/10.1108/itpd-05-2020-0063>
- Putra, Z. K. P., & Suhardianto, N. (2020). The Influence of Political Connection on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 82–90. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.82-90>
- Putri, R. A., & Kartika, T. P. D. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energy di BEI Tahun 2018-2022. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 13(2), 162–172. <http://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/index>
- Rudyanto, A., Julisar, J., & Debora, D. (2023). Political connection as a double-edged sword: the case of tax aggressiveness practice during the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(4), 400–410. <https://doi.org/10.1108/AJAR-04-2023-0113>
- Rusdiani, W., & Umaimah, U. (2023). Journal of Culture Accounting and Auditing Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(2), 54–68. <http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa>
- Saputra, W. S. (2023). *Rasio Pajak Indonesia Masih Rendah, Ini Strateginya!* <https://www.pajak.go.id/>. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/rasio-pajak-indonesia-masih-rendah-ini-strateginya>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sulia, S. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq45 Di Bei Periode 2019-2021. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 29(1), 39–48. <https://doi.org/10.23960/jak.v29i1.1301>
- Tax Justice Network. (n.d.). *State of Tax Justice*.
- Thohiroh, L. A., & Aisyaturrahmi. (2022). Apakah Kualitas Audit dapat Mempengaruhi Audit Report Lag Di Masa Pandemi Covid-19? *Jimea*, 6(1), 577–595.
- Ubaidillah, M. (2022). Peran Koneksi Politik dalam Melakukan Tax Avoidance. *Owner*, 6(1), 781–791. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.667>
- Venusita, L., Pujiono, P., Aisyaturrahmi, A., & ... (2025). Pelatihan Pajak UMKM Bagi Masyarakat Migran Indonesia Di Malaysia. *Abimanyu: Journal of ...*, 6, 41–49. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/abimanyu/article/view/29758%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/abimanyu/article/download/29758/12906>
- Wildan, M. (2020). *Indonesia Diperkirakan Rugi Rp69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/25729/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Yahya, A., Dyah Permatasari, M., Hidayat, T., & Fahrurroji, M. (2021). Tax Avoidance: Good Corporate Governance dan Kualitas Audit. *Jurnal Pelita Ilmu*, 15(02), 95–105. <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/jpi/article/view/926>